***Mata Kuliah : Diplomasi dan Negosiasi***

***Dosen : Andrias Darmayadi, M.Si***

**Memahami Diplomasi**

Pada masa kini dengan berkembang luasnya isu internasional menyebabkan hubungan internasional tidak lagi dipandang sebagai hubungan antar negara namun juga meliputi hubungan antar masyarakat internasional. Hal tersebut turut mendorong terjadinya peningkatan peran yang sangat signifikan dalam aktivitas diplomasi. Dengan demikian, seiring dengan perkembangan yang terjadi, diplomasi tradisional yang hanya melibatkan peran pemerintah dalam menjalankan misi diplomasi, dinilai tidak lagi efektif dalam menyampaikan pesan-pesam diplomasi terhadap suatu negara. Maka dari itu, masyarakat *(public)* sudah mulai dilibatkan dalam proses diplomasi.

Kata diplomasi tidak asing lagi bagi kita, diplomasi merupakan suatu cara komunikasi yang dilakukan antara berbagai pihak termasuk negosiasi antara wakil – wakil yang sudah diakui. Praktik-praktik negara semacam itu sudah melembaga sejak dahulu dan kemudian menjelma sebagai aturan-aturan hukum internasional. Pengertian diplomasi itu sendiri mengarah pada interaksi antar negara bangsa. Secara tradisional, diplomasi dilakukan oleh pegawai pemerintah (diplomat) yang menegosiasikan traktat, kebijakan perdagangan dan perjanjian-perjanjian internasional lainnya. Konsep diplomasi sudah lahir sejak zaman Yunani Bizantium dan masa Renaissance di Italia sampai dengan munculnya konsep negara bangsa modern Westphalia 1648 yang berlanjut pada terbentuknya system negara Eropa yang ditandai dengan Kongres Wina 1815. Namun, proses diplomasi yang dilakukan pada masa itu kebanyakan tidak mengarah pada *win-win solution* akan tetapi lebih kepada *win-lose solution*  dimana posisi tawar menawar yang terjadi selalu membuat negara-negara dengan power yang lebih lemah harus menerima kenyataan kalah bersaing dalam negosiasi dengan negara-negara yang memiliki power yang lebih kuat. Hal inilah yang kemudian menjadi factor kegagalan atau ketidakefektifan diplomasi tradisional.

Diplomasi merupakan praktik pelaksanaan hubungan antara negara melalui perwakilan resmi. Diplomasi dapat mencakup seluruh proses hubungan luar negeri, pembentukan kebijaksanaan luar negeri, serta pelaksanaannya.[[1]](#footnote-1) Diplomasi tidak dapat dipisahkan dengan politik luar negeri, tetapi kedua-duanya merupakan kebijakan eksekutif untuk menetapkan strategi, diplomasi dan taktik.[[2]](#footnote-2) Dengan demikian diplomasi juga merupakan cara-cara yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara untuk mencapai tujuannya dan memperoleh dukungan mengenai prinsip-prinsip yang diambilnya.[[3]](#footnote-3)

S.L.Roy mencoba mengkaji hal-hal penting yang terdapat dalam berbagai definisi mengenai diplomasi. Menurutnya, dari definisi-definisi tersebut, beberapa hal tampak jelas bahwa:[[4]](#footnote-4)

1. Unsur pokok diplomasi adalah negosiasi
2. Negosiasi dilakukan untuk mengedepankan kepentingan negara
3. Tindakan – tindakan diplomatik diambil untuk menjaga serta memajukan kepentingan nasional sejauh mungkin dan dilaksanakan secara damai, pemeliharaan perdamaian dengan tanpa merusak kepentingan nasional merupakan tujuan utama diplomasi.
4. Teknik-teknik diplomasi yang sering dipakai untuk melakukan perang bukan untuk menghasilkan perdamaian.
5. Diplomasi berhubungan erat dengan tujuan politik luar negeri suatu negara
6. Diplomasi modern berhubungan erat dengan sistem negara
7. Diplomasi tidak dapat dipisahkan dari perwakilan negara.

Mengenai istilah diplomasi yang diberikan dalam berbagai definisi dan argument oleh para diplomat terkemuka serta para pakar dalam hubungan internasional dan diplomasi mungkin dianggap belum memadai mekipun telah mencakup berbagai aspek, Sir.Ernedt Satow [[5]](#footnote-5), dalam bukunya memberikan definisi sebagai berikut:

“Diplomasi adalah penggunaan dari kecerdasan dan kebijaksanaan untuk melakukan hubungan resmi antara pemerintah negara-negara merdeka, kadang-kadang juga dilakukan dalam hubungannya dengan negara-negara pengikutnya, atau lebih singkatnya lagi,pelaksanaan urutan tersebut dilakukan antara negara dengan cara damai”.

Diplomasi merupakan suatu cara berkomunikasi yang sudah dilakukan antara berbagai pihak termasuk negosiasi antara wakil – wakil yang sudah diakui. Praktik taktik negara semacam itu sudah melembaga sejak dulu dan kemudian menjelma sebagai aturan-aturan hukum internasional.[[6]](#footnote-6) Dengan demikian diplomasi juga merupakan cara – cara yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara untuk mencapai tujuannya dan memperoleh dukungan mengenai prisnsip-prinsip yang diambilnya . itu juga merupakan suatu proses politik untuk membina kebijakan luar negeri yang dianut dan ditujukan untuk memperngaruhi kebijakan dan sikap pemerintah negara lain. Disamping itu, diplomasi juga dianggap sebagai pengetahuan, mutu, dan kepandaian untuk membendung dan mengarungi adanya konflik internasional yang terjadi.

Menurut Brounlie, diplomasi merupakan setiap cara yang diambil untuk mengadakan dan membina hubungan serta berkomunikasi satu sama lain, atau melaksanakan transaksi politik maupun hukum yang dalam setiap hal melalui wakil-wakilnya yang mendapat otorisasi.[[7]](#footnote-7) Diplomasi pada hakekatnya juga merupakan negosiasi dan hubungan antar negara yang dilakukan oleh pejabat-

pejabat pemerintah, untuk itu diperluakn suatu seni dan kemampuan serta kepandaian untuk mempengaruhi seseorang sehingga dapat tercapai tujuannya. Kemampuan untuk berunding itu harus dilakukan secara maksimal agar dapat dicapai hasil yang maksimal pula dalam suatu sistem politik dimana suatu perang bisa terjadi.

Dari batasan-batasan tersebut diatas, kiranya dapat dilihat pendapat Barston [[8]](#footnote-8) yeng termasuk hubungan negara-negara dengan pelaku-pelaku lainnya. Dari aspek diplomasinya maka diplomasi itu juga menyangkut pemberian saran, penentuan serta pelaksanaan politik luar negeri. Dengan demikian, diplomasi itu juga merupakan cara – cara dimana negara melalui wakil-wakil resmi maupun wakil-wakil lainnya termasuk juga para pelaku lainnya, membicarakan dengan baik, mengkoordinasikan dan menjamin kepentingan-kepentingan tertentu atau yang lebih luas melalui surat menurut, pembicaraan secara pribadi dengan mengadakan pertukaran pandangan,pendekatan, kunjungan-kunjungan dan bahkan sering dengan ancaman-ancaman dan kegiatan yang berhubungan lainnya.

Dengan meningkatnya saling ketergantungan antar negara, maka telah terlihat meningkatnya pertemuan

internasional secara terus menerus, misalnya seperti konferensi multilateral ataupun diplomasi parlementer. Negara satu sama lain telah berhubungan dalam banyak kesempatan dan permasalahan, namun banyak kegiatan diplomatik yang tetap dilakukan secara bilateral dan yang dilakukan melalui saluran biasa diplomatik dari kementrian luar negeri serta diplomatik yang berada dinegara tersebut. Masalah-masalah yang kritis sering kali dirundingkan dalam tingkatan yang paling tinggi dengan melibatkan kepala-kepala negara didalam diplomasi tingkat tinggi yang melibatkan kepala-kepala negara dalam diplomasi puncak.[[9]](#footnote-9)

Peranan diplomasi besar sekali didalam kesuksesan bernegosiasi pada waktu mencapai puncaknya didalam suatu perjanjian atau persetujuan. Oleh sebab itu suatu kesabaran didalam negosiasi dianggap merupakan salah satu sifat yang besar dalam diplomasi. Pada waktu meyerahkan atau menuntut suatu persoalan akan tergantung bukan saja instruksi dari negara pengirim tetapi juga dari putaran dan giliran negosiasi yang akan berlangsung dari waktu ke waktu. Disamping peranan diplomat, para wakil negara juga memainkan peranan penting didalam negosiasi baik melalui pertemuan-pertemuan resmi maupun tidak resmi.[[10]](#footnote-10)

1. Jack Plano dan Roy Olton.1999. Kamus Hubungan Internasional. Bandung : Pustaka Abidin. Hlm.20 [↑](#footnote-ref-1)
2. Sumaryo Suryokusumo.2004.Praktik Diplomasi.jakarta:STIH”IBLAM”. Hlm.53-54. [↑](#footnote-ref-2)
3. Sumaryo Suryokusumo.2004.Loc.Cit. Hlm.9-10 [↑](#footnote-ref-3)
4. S.L.Roy (1991:4-5) [↑](#footnote-ref-4)
5. Sir Ernest Satow, *A Guide to Diplomatic Practice*, 4th Edition,1962,hlm.1. [↑](#footnote-ref-5)
6. Sumaryo Suryo Kusumo, Hukum Diplomatik, Teori dan Kasus, Bandung:Alumni,1995, Hlm. 1-2 [↑](#footnote-ref-6)
7. Ian Brounlie, *Principils of public International Law,3rd*  edition, Oxford University Press,1979, hlm.345 [↑](#footnote-ref-7)
8. R.P. Barston, Modern Diplomacy, 2nd edition, London: Longman,1977, hlm 1 [↑](#footnote-ref-8)
9. Jack.C. Plano dan Roy Olton, The International Relations Dictionary, 4th edition,USA,1998, hlm 241. [↑](#footnote-ref-9)
10. Sumaryo Suryo Kusumo. 2004. Diplomasi Teori dan Peraktek.Jakarta: STIH “IBLAM”.Hlm. 25. [↑](#footnote-ref-10)